

ABSTRAK

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sebagai aktor utama dalam isu keamanan manusia terutama pengungsi memiliki peran strategis sebagai pemberi perlindungan dan pengelolaan terhadap pengungsi. Masalah yang muncul diakibatkan oleh aksi pemindahan paksa penduduk Rohingya oleh militer Myanmar pada 2017 menyebabkan gelombang besar-besaran pengungsi etnis Rohingya ke berbagai negara tetangga. Malaysia sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tidak memiliki kewajiban dan kerangka hukum nasional dalam mengelola pengungsi. Aspek kemanusiaan yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya di Malaysia akan menjadi salah satu sudut pandang penulis dalam melihat bagaimana UNHCR berperan dalam menjalankan mandatnya. Kerangka analisis penelitian menggunakan teori peran organisasi internasional menurut Clive Archer yang membagi Peran Organisasi Internasional menjadi tiga dimensi, yaitu sebagai aktor independen, forum, dan instrumen serta menggunakan konsep Keamanan Manusia dari United Nations Development Programme (UNDP). Penelitian ini menganalisis peran UNHCR dalam pengelolaan pengungsi Rohingya di Malaysia tahun 2017-2019 melalui teori Clive Archer. Sebagai aktor independen, instrumen, dan forum, UNHCR berhasil mengisi kekosongan hukum di negara non-konvensi tersebut dengan mengambil alih fungsi registrasi dan proteksi dasar. Keberhasilan pengelolaan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan serta menerapkan pendekatan perlindungan berbasis pemberdayaan komunitas yang partisipatif.

Kata Kunci: UNHCR, Pengungsi, Rohingya, Malaysia

Abstract

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), as the primary actor in human security issues, particularly refugee protection, plays a strategic role in providing protection and managing refugee affairs. The humanitarian crisis triggered by the forced displacement of the Rohingya population by the Myanmar military in 2017 resulted in a massive influx of Rohingya refugees into neighboring countries, including Malaysia. As a non-signatory state to the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol, Malaysia has neither international legal obligations nor a national legal framework governing refugee management and protection. The humanitarian conditions faced by Rohingya refugees in Malaysia serve as the primary perspective through which this study examines the role of UNHCR in implementing its mandate. This study employs the theory of international organizations proposed by Clive Archer, which conceptualizes the roles of international organizations into three dimensions: as an independent actor, a forum, and an instrument. In addition, this research adopts the Human Security concept developed by the United Nations Development Programme (UNDP) to analyze the humanitarian challenges experienced by Rohingya refugees in Malaysia. This research analyzes UNHCR's role in managing Rohingya refugees in Malaysia during the 2017-2019 period using Clive Archer's theory. As an independent actor, instrument, and forum, UNHCR successfully fills the legal vacuum in this non-signatory state by assuming registration and basic protection functions. This management's success is heavily driven by the organization's capacity to strengthen multi-stakeholder coordination and implement a participatory, community-based empowerment protection approach.

Keywords: UNHCR, Refugees, Rohingya, Malaysia